

**ANALISIS PERTUMBUHAN EKONOMI DAN
TINGKAT KETIMPANGAN DI KABUPATEN/KOTA
YANG TERGABUNG DALAM KAWASAN
KEDUNGSEPUR TAHUN 2004-2008**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi
Universitas Diponegoro

Disusun Oleh :

**PUTRA FAJAR UTAMA
C2B606042**

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2010**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Putra Fajar Utama

Nomor Induk Mahasiswa : C2B606042

Fakultas / Jurusan : Ekonomi / IESP (Ilmu Ekonomi dan Studi
Pembangunan)

Judul Skripsi : **ANALISIS PERTUMBUHAN
EKONOMI DAN TINGKAT
KETIMPANGAN DI KABUPATEN /
KOTA YANG TERGABUNG DALAM
KAWASAN KEDUNGSEPUR TAHUN
2004-2008**

Dosen Pembimbing : Dra. Hj. Tri Wahyu Rejekiningsih, M.Si

Semarang, 15 Desember 2010

Dosen Pembimbing,

(Dra. Hj. Tri Wahyu Rejekiningsih, M.Si)
NIP. 196602101992032001

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Putra Fajar Utama

Nomor Induk Mahasiswa : C2B606042

Fakultas / Jurusan : Ekonomi / IESP (Ilmu Ekonomi dan Studi
Pembangunan)

Judul Usulan Penelitian Skripsi : **ANALISIS PERTUMBUHAN
EKONOMI DAN TINGKAT
KETIMPANGAN DI
KABUPATEN/KOTA YANG
TERGABUNG DALAM KAWASAN
KEDUNGSEPUR TAHUN 2004-2008**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 23 Desember 2010

Tim Penguji :

1. Dra. Hj. Tri Wahyu R, M.Si (.....)
2. Dr. Dwisetia Poerwono, M.Sc (.....)
3. Johanna MK. SE., M.Ec., Ph.D (.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Putra Fajar Utama, menyatakan bahwa skripsi dengan judul : **“ANALISIS PERTUMBUHAN EKONOMI DAN TINGKAT KETIMPANGAN DI KABUPATEN/KOTA YANG TERGABUNG DALAM KAWASAN KEDUNGSEPUR TAHUN 2004-2008”**, adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai tulisan hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 15 Desember 2010

Yang membuat pernyataan,

(Putra Fajar Utama)
NIM: C2B606042

ABSTRACT

Kedungsepur is a Particular Region which is included in the National Spatiai Planning. Therefore, this region is planned to be the center of national growth. In encouraging the region development optimally, it is needed the solid relationship interregion in Kedungsepur Region. Such efforts in supporting the relationship, for example is by discovering the potential sectors across the region.

Kedungsepur economic growth as a whole continues to increase. Average economic growth Kedungsepur in 2004 until 2008 approximately 4.86%, while the average economic growth of districts in Kedungsepur still many who are under 4.86% except for 5.60% Semarang City. The difference of economic growth in each region indicates a disparity of income Kedungsepur. Income disparities between regions can lead to problems of development and economic instability. This study aimed to analyze the disparities between regions and economic development district, to analyze the sectors likely to be developed in order to encourage economic growth, classify regions and sectors of the district in Kedungsepur based on growth rate and per capita income / contribution. The analytical method used is an index analysis Williamson, Location Quotient (LQ), Shift Share and Typology Klassen.

The results of this study explains that: manufacturing industry and agricultural sectors, including sectors that have the potential to boost economic growth each district / city in Kedungsepur. Income disparities between regions in Kedungsepur in the period 2004-2008 include low (<0.5) and tend to remain.

Based on these findings suggestions that can be delivered to reduce the income disparity between districts is to implement development policies that prioritize the areas that are still relatively behind without ignoring areas that are already developed and grown rapidly. Development of potential sectors that have become the basic sector in each region in order to accelerate the rate of economic growth, particularly in the agricultural sector agribusiness and agro-industrial sector by creating inter-sectoral linkages.

Keywords: Income Disparity, Economic Growth, Kedungsepur

ABSTRAKSI

Wilayah Kedungsepur merupakan Kawasan Tertentu yang terdapat di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN). Dengan demikian wilayah ini direncanakan sebagai pusat pertumbuhan nasional. Guna mendorong terjadinya pertumbuhan wilayah secara lebih optimal, maka diperlukan adanya kerjasama antar daerah di wilayah Kedungsepur. Usaha-usaha yang dilakukan dalam mendorong terjadinya kerjasama antar daerah tersebut sangat diperlukan, diantaranya dengan menggali sektor-sektor potensial lintas daerah.

Pertumbuhan ekonomi Kedungsepur secara keseluruhan terus mengalami peningkatan. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Kedungsepur pada tahun 2004 sampai tahun 2008 sekitar 4,86%, sedangkan rata-rata pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Kedungsepur masih banyak yang berada dibawah 4,86% kecuali Kota Semarang sebesar 5,60 %. Perbedaan pertumbuhan ekonomi tiap daerah di Kedungsepur mengindikasikan adanya disparitas pendapatan. Disparitas pendapatan antar daerah dapat menyebabkan permasalahan pembangunan dan ketidakstabilan perekonomian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis besarnya disparitas antar daerah dan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota, menganalisis sektor-sektor yang berpotensi dikembangkan guna mendorong pertumbuhan ekonomi, mengklasifikasi daerah dan sektor-sektor kabupaten/kota di Kedungsepur berdasarkan laju pertumbuhan dan pendapatan perkapitanya/kontribusinya. Metode analisis yang digunakan adalah analisis indeks Williamson, *Location Quotient* (LQ), *Shift Share* dan *Tipologi Klassen*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : sektor industri pengolahan dan sektor pertanian termasuk sektor yang berpotensi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tiap kabupaten/kota di Kedungsepur. Ketimpangan pendapatan antar daerah di Kedungsepur tahun 2004-2008 tergolong rendah ($< 0,5$) dan cenderung tetap.

Berdasarkan temuan tersebut saran yang dapat disampaikan untuk mengurangi disparitas pendapatan antar kabupaten/kota adalah menerapkan kebijakan pembangunan yang memprioritaskan pada daerah-daerah yang masih relatif tertinggal tanpa mengabaikan daerah-daerah yang sudah maju dan tumbuh pesat. Pembangunan sektor-sektor potensial yang telah menjadi sektor basis di masing-masing daerah supaya mempercepat laju pertumbuhan ekonominya, terutama pada sektor pertanian dengan agribisnis dan sektor industri dengan agroindustri sehingga menciptakan keterkaitan antar sektoral.

Kata kunci : Ketimpangan pendapatan, Pertumbuhan ekonomi, Kedungsepur

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Analisis Pertumbuhan Ekonomi Dan Tingkat Ketimpangan Di Kabupaten/Kota Yang Tergabung Dalam Kawasan Kedungsepur Tahun 2004-2008*”. Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis menyadari bahwa selama penyusunan skripsi ini banyak mendapat bimbingan, dukungan, dan motivasi dari berbagai pihak, sehingga dalam kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. H. M. Chabachib, Msi, Akt, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
2. Ibu Dra. Hj. Tri Wahyu Rejekiingsih, M.Si selaku dosen pembimbing, yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, motivasi, masukan-masukan dan saran yang sangat berguna bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Drs. H. Edy Yusuf AG, MSc,Ph.D, selaku dosen wali yang banyak memberikan bimbingan, pengarahan dan motivasi selama penulis menjalani studi di Fakultas Ekonomi UNDIP.
4. Seluruh Dosen dan Staf pengajar Fakultas Ekonomi UNDIP yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi penulis.
5. Staf Administrasi Fakultas Ekonomi UNDIP (Pak Suyitno, Kang Slamet, Kang Parji) yang telah berbagi pengalaman dan masukan-masukan yang berguna bagi penulis.
6. Ayahanda tercinta Putut Sujoko (Alm), SH dan Ibunda tersayang Siti Cholisoah atas curahan kasih sayang, untaian dan doa. Alhamdulillah sehingga ananda mampu menyelesaikan kuliah. Semoga Allah SWT

meridhoi niat ananda untuk membalas semua kasih sayang serta do'a bapak dan ibu.

7. Keluarga saudara-saudaraku Om Najib, Om Taufik, Bulek Mun atas dukungan dan doa yang engkau berikan.
8. Kakakku tersayang Setiaty Solichah, SH beserta suami Hajar Priyono, SE, Umy Fadhilah, SH beserta suami Sigid Wirawan, SE, dan Muhammad Yusuf Perdana, SH beserta istri Gigih Endah atas dukungan dan doa yang telah engkau berikan.
9. Seseorang yang telah memberi cinta dan kasih sayangnya, Khoirunnisak Warrohmah terima kasih atas kesabaran untuk menemani penulis dalam suka dan duka, serta semangat yang diberikan saat penulis berada dalam masalah. Semoga Allah mengijinkan kita selalu bersama. Amin.
10. Kakak angkatan tahun 2004 dan 2005 yang telah memberikan ilmu kedewasaan bagi penulis.
11. Teman-teman IESP '06 : Amy, Ravi, Rama, Danang, Andika W, Boy, Cahyo, Dini, Ayu, Ganis, Fany, Dedy, Doyok, Dyke, Miyex, Fajar, Farid, Adith, Fira dan seluruh teman-teman IESP'06 yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Terima kasih untuk segala bantuan, kerjasama, dan kenangan yang telah kalian berikan.
12. Tim Futsal dan Tim Touring IESP '06, terimakasih telah memberikan kenangan terindah selama di UNDIP.
13. Teman-teman KKN Bergas Lor : Mas Yoga (Kordes), Mas Dana, Mas Rinto, Bonar, Ayu, Retra, mbak Rizky, dll yang selalu memberikan semangat dan mewarnai hidup penulis.
14. Terakhir untuk semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, yang telah memberikan bantuannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, segala kekurangan, kesalahan dan ketidaksempurnaan skripsi ini adalah tanggung jawab penulis. Namun apabila kebenaran dalam skripsi semata hanya keridhoan Allah SWT sang maha

sempurna. Semoga penelitian ini bermanfaat bagi kita semua dan dapat dijadikan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya sehingga penulis tak lupa mengharapkan saran dan kritik atas skripsi ini.

Amin.

Semarang, 15 Desember

2010

Penulis

Putra Fajar Utama

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
1	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
1.4 Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Landasan Teori	12
2.1.1 Teori Pertumbuhan Ekonomi	12
2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi Regional	13
2.1.3 Ketimpangan Pendapatan Regional	15
2.1.4 Pertumbuhan ekonomi dan Ketimpangan.....	17
2.1.5 Analisis Potensi Perekonomian Wilayah	19
2.2 Penelitian Terdahulu	21
2.3 Kerangka Pemikiran	24
BAB III METODE PENELITIAN	26
3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	26

3.2 Jenis dan Sumber Data	27
3.3 Metode Analisis	28
3.3.1 Indeks Williamson	28
3.3.2 <i>Location Quotient</i>	29
3.3.3 <i>Shift Share</i>	30
3.3.4 <i>Typologi Klassen</i>	33
BAB IV HASIL DAN ANALISIS	36
4.1 Deskripsi Profil Obyek Penelitian	36
4.1.1 Keadaan Geografis	36
4.1.2 Demografis Kabupaten/Kota Di KEDUNGSEPUR.	37
4.2 Profil Perekonomian KEDUNGSEPUR	38
4.2.1 PDRB dan Laju PDRB Kabupaten/Kota di KEDUNGSEPUR Tahun 2004-2008	38
4.2.2 PDRB Per Kapita da Laju PDRB Per Kapita Kabupaten/Kota di KEDUNGSEPUR Tahun 2004-2008.....	40
4.3 Analisis Data.....	41
4.3.1 Indeks Williamson	41
4.3.2 Analisis <i>Location Quotient</i> (LQ)	43
4.3.3 Analisis <i>Shift Share</i>	48
4.3.3.1 Analisis <i>Shift Share</i> Kabupaten Kendal	48
4.3.3.2 Analisis <i>Shift Share</i> Kabupaten Demak	50
4.3.3.3 Analisis <i>Shift Share</i> Kabupaten Semarang.....	51
4.3.3.4 Analisis <i>Shift Share</i> Kota Semarang	53
4.3.3.5 Analisis <i>Shift Share</i> Kabupaten Grobogan.....	54
4.3.3.6 Analisis <i>Shift Share</i> Kota Salatiga.....	55
4.3.4 Analisis <i>Typologi Klassen</i> Pendekatan Sektor.....	57
4.3.4.1 Analisis <i>Typologi Klassen</i> Kabupaten Kendal	57
4.3.4.2 Analisis <i>Typologi Klassen</i> Kabupaten Demak	58
4.3.4.3 Analisis <i>Typologi Klassen</i> Kabupaten Semarang.....	60

4.3.4.4 Analisis <i>Typologi Klassen</i> Kota Semarang	62
4.3.4.5 Analisis <i>Typologi Klassen</i> Kabupaten Grobogan	63
4.3.4.6 Analisis <i>Typologi Klassen</i> Kota Salatiga	65
4.3.5 Analisis <i>Typologi Klassen</i> Pendekatan Wilayah ..	67
BAB V PENUTUP	68
5.1 Simpulan	68
5.2 Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN-LAMPIRAN	76
Lampiran A	76
Lampiran B	80
Lampiran C	83
Lampiran D	85
Lampiran E	92

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 PDRB Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2004-2008.....	4
Tabel 1.2 PDRB Kabupaten/Kota Dirinci Menurut Pembagian Kawasan Strategis Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2004-2008	5
Tabel 1.3 PDRB Kabupaten/Kota di KEDUNGSEPUR, 2004-2008 ..	6
Tabel 1.4 PDRB Per Kapita Di Kab / Kota Di Kawasan KEDUNGSEPUR Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2004-2008	8
Tabel 2.1 Ringkasan Hasil-hasil Penelitian Terdahulu	22
Tabel 3.1 Pengelompokan Pembangunan <i>Typologi Klassen</i>	33
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah Kabupaten/Kota Di KEDUNGSEPUR Tahun 2004-2008.....	38
Tabel 4.2 PDRB Kabupaten/Kota di KEDUNGSEPUR Tahun 2004-2008.....	39
Tabel 4.3 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten/Kota di KEDUNGSEPUR Tahun 2004-2008	39
Tabel 4.4 PDRB per Kapita Kabupaten/Kota di KEDUNGSEPUR Tahun 2004-2008	40
Tabel 4.5 Laju Pertumbuhan PDRB per Kapita Kabupaten/Kota di KEDUNGSEPUR Tahun 2004-2008.....	41
Tabel 4.6 Hasil Perhitungan Indeks Williamson Kabupaten/Kota di KEDUNGSEPUR tahun 2004-2008	42
Tabel 4.7 Hasil Perhitungan Rata-rata <i>Location Quotient</i> (LQ) Kabupaten/Kota di KEDUNGSEPUR tahun 2004-2008.....	44
Tabel 4.8 Hasil Perhitungan <i>Shift Share</i> Kabupaten Kendal	48
Tabel 4.9 Hasil Perhitungan <i>Shift Share</i> Kabupaten Demak	50
Tabel 4.10 Hasil Perhitungan <i>Shift Share</i> Kabupaten Semarang	51
Tabel 4.11 Hasil Perhitungan <i>Shift Share</i> Kota Semarang	53
Tabel 4.12 Hasil Perhitungan <i>Shift Share</i> Kabupaten Grobogan	54
Tabel 4.13 Hasil Perhitungan <i>Shift Share</i> Kota Salatiga	55
Tabel 4.14 Laju Pertumbuhan dan Kontribusi sektor PDRB KEDUNGSEPUR dan Kabupaten Kendal Tahun 2004-2008	57
Tabel 4.15 Hasil Analisis <i>Typologi Klassen</i> Kabupaten Kendal, 2004-2008	58
Tabel 4.16 Laju Pertumbuhan dan Kontribusi sektor PDRB KEDUNGSEPUR dan Kabupaten Demak Tahun 2004-2008	59
Tabel 4.17 Hasil Analisis <i>Typologi Klassen</i> Kabupaten Demak, 2004-2008.....	60

Tabel 4.18 Laju Pertumbuhan dan Kontribusi sektor PDRB KEDUNGSEPUR dan Kabupaten Semarang Tahun 2004- 2008.....	60
Tabel 4.19 Hasil Analisis <i>Typologi Klassen</i> Kabupaten Semarang, 2004- 2008.....	61
Tabel 4.20 Laju Pertumbuhan dan Kontribusi sektor PDRB KEDUNGSEPUR dan Kota Semarang Tahun 2004-2008 ...	62
Tabel 4.21 Hasil Analisis <i>Typologi Klassen</i> Kota Semarang, 2004-2008	63
Tabel 4.22 Laju Pertumbuhan dan Kontribusi sektor PDRB KEDUNGSEPUR dan Kabupaten Grobogan Tahun 2004- 2008.....	64
Tabel 4.23 Hasil Analisis <i>Typologi Klassen</i> Kabupaten Grobogan, 2004- 2008.....	64
Tabel 4.24 Laju Pertumbuhan dan Kontribusi sektor PDRB KEDUNGSEPUR dan Kota Salatiga Tahun 2004-2008	65
Tabel 4.25 Hasil Analisis <i>Typologi Klassen</i> Kota Salatiga, 2004-2008 .	66
Tabel 4.26 Hasil Rekapitulasi Analisis <i>Typologi Klassen</i> Kabupaten/Kota di KEDUNGSEPUR, 2004-2008.....	66
Tabel 4.27 Klasifikasi Wilayah <i>Typologi Klassen</i> Kabupaten/Kota di KEDUNGSEPUR, 2004-2008	67
Tabel 5.1 Rekapitulasi Hasil Analisis	70

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Pertumbuhan PDRB Dirinci Menurut Pembagian Kawasan Strategis	5
Gambar 1.2 Laju Pertumbuhan KEDUNGSEPUR dengan Jawa Tengah, 2004-2008	6
Gambar 1.3 Laju PDRB Di Kabupaten / Kota di KEDUNGSEPUR Tahun 2004-2008	7
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	25
Gambar 4.1 Gambar Peta KEDUNGSEPUR.....	37

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran A Data PDRB, Laju PDRB, PDRB per Kapita, dan Laju PDRB per Kapita
- Lampiran B Indeks Williamson Kabupaten/Kota di KEDUNGSEPUR Tahun 2004-2008
- Lampiran C Analisis *Location Quotient* (LQ) Kabupaten/Kota di KEDUNGSEPUR Tahun 2004-2008
- Lampiran D Analisis *Shift Share* Kabupaten/Kota di KEDUNGSEPUR Tahun 2004-2008
- Lampiran E Analisis *Typologi Klassen* Kabupaten/Kota di KEDUNGSEPUR Tahun 2004-2008

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan daerah sebenarnya adalah bagian integral dari pembangunan nasional. Pembangunan yang dilaksanakan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan pembangunan harus seimbang jangan sampai ada gerakan protes dari tiap daerah dan memunculkan potensi disintegrasi bangsa dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Isu dan kekhawatiran akan adanya gerakan disintegrasi tersebut akhirnya memunculkan undang-undang yang memberikan keleluasaan kepada daerah dalam wujud otonomi daerah yang luas dan bertanggung jawab yang sesuai kondisi dan potensi wilayahnya. Otonomi daerah itu sendiri resmi dicanangkan oleh pemerintah pada tanggal 1 januari 2001. Tujuan diadakannya otonomi daerah adalah terciptanya pertumbuhan ekonomi, stabilisasi nasional dan pemerataan pendapatan. Kebijakan otonomi daerah dicanangkan agar mendorong Pemerintah daerah untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan antar wilayah sesuai dengan keadaan wilayahnya masing-masing (Nugroho, 2003).

Adanya kondisi tiap-tiap daerah yang berbeda menyebabkan strategi kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah daerah juga berbeda-beda. Perbedaan tersebut diakibatkan antara lain adanya perbedaan potensi sumber daya dan aktivitas manusia serta pertumbuhan penduduk yang dimiliki oleh masing-masing wilayah. Selain itu, tidak dapat dipungkiri bahwa pembangunan ini hanya terkonsentrasi di daerah pusat saja dan kurang memperhatikan daerah pendukung. Agar pembangunan dapat berjalan dengan seimbang dan lancar maka pemerintah harus memperhatikan semua daerah tanpa ada perlakuan khusus bagi masing-masing daerah.

Di negara yang sedang berkembang, campur tangan pemerintah sangat diperlukan dalam pembangunan wilayah. Campur tangan tersebut adalah pemerintah sebagai bentuk institusi merupakan sistem pengambil keputusan dan

melahirkan aturan-aturan yang menyangkut alokasi sumber daya serta pemanfaatannya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah melalui Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengatakan bahwa, perencanaan pembangunan nasional maupun regional merupakan kegiatan yang berlangsung terus-menerus dan berkesinambungan mengikuti pola tertentu berdasar hasil telaah yang cermat terhadap situasi dan kondisi yang bagus. Pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk merencanakan dan mengelola pembangunan melalui Undang-undang No. 22 tahun 1999 revisi menjadi Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang No. 25 tahun 1999 revisi menjadi undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Mudrajad Kuncoro, 2004)

Kondisi dan potensi ekonomi daerah merupakan modal dasar dan faktor dominan yang dimiliki Propinsi Jawa Tengah yang dapat didayagunakan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk itu perlu langkah strategis dalam pelaksanaan pembangunan dari pemerintah, terutama dalam mengambil kebijakan yang mengarah pada perkembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi daerah.

Melalui Perda Propinsi Jawa Tengah No.8 tahun 1992 dengan pembaruan Perda Propinsi Jawa Tengah No.21 tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Tengah, Pemerintah Propinsi membentuk kawasan kerjasama antar daerah yang dipandang dari potensi dan struktur ekonomi kewilayahan dapat dimanfaatkan bagi upaya pemerataan pembangunan dalam suatu kawasan. Berikut ini 8 (delapan) Kawasan Kerjasama antardaerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah :

1. Kawasan KEDUNGSEPUR {Kab. Kendal, Kab. Demak, Kab. Semarang (Ungaran), Kota Semarang, Kab. Grobogan (Purwadadi) dan Kota Salatiga};
2. Kawasan BARLINGMASCAKEB (Kab. Banjarnegara, Kab. Purbalingga, Kab. Banyumas, Kab. Cilacap dan Kab. Kebumen);
3. Kawasan PURWOMANGGUNG (Kab. Purworejo, Kab. Wonosobo, Kab. Magelang, Kota Magelang dan Kab. Temanggung);

4. Kawasan SUBOSUKOWONOSRATEN (Kota Surakarta, Kab. Boyolali, Kab. Sukoharjo, Kab. Karanganyar, Kab. Wonogiri, Kab. Sragen dan Kab. Klaten);
5. Kawasan BANGLOR (Kab. Rembang dan Kab. Blora);
6. Kawasan WANARAKUTI (Juwana, Kab. Jepara, Kab. Kudus dan Kab. Pati);
7. Kawasan TANGKALLANGKA (Batang, Pekalongan, Pemalang dan Kajen);
8. Kawasan BREGAS (Brebes, Tegal dan Slawi).

Tabel 1.1
PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000
Kabupaten/Kota di Jawa Tengah
Tahun 2004-2008 (jutaan Rp)

KABUPATEN/KOTA	2004	2005	2006	2007	2008
Kab. Cilacap	9.631.458,53	10.145.144,44	10.623.929,25	11.140.846,35	11.689.092,90
Kab. Banyumas	3.486.633,69	3.598.399,16	3.759.547,61	3.958.645,95	4.172.781,99
Kab. Purbalingga	1.844.532,07	1.921.653,92	2.018.808,10	2.143.746,23	2.257.392,77
Kab. Banjarnegara	2.191.162,85	2.277.617,86	2.376.694,59	2.495.785,82	2.619.989,61
Kab. Kebumen	2.291.022,40	2.364.385,90	2.460.816,97	2.572.062,88	2.716.236,74
Kab. Purworejo	2.214.137,28	2.321.543,04	2.442.927,31	2.591.535,38	2.737.087,13
Kab. Wonosobo	1.521.807,31	1.570.347,69	1.621.132,33	1.679.149,65	1.741.148,31
Kab. Magelang	3.102.727,38	3.245.978,81	3.405.369,22	3.582.647,65	3.761.388,59
Kab. Boyolali	3.321.066,35	3.456.388,80	3.601.225,20	3.748.102,11	3.899.372,86
Kab. Klaten	3.975.792,87	4.158.205,16	4.253.788,00	4.394.688,02	4.567.200,96
Kab. Sukoharjo	3.786.212,72	3.941.788,46	4.120.437,35	4.330.992,90	4.540.751,53
Kab. Wonogiri	2.329.459,06	2.429.869,63	2.528.851,78	2.657.068,89	2.770.435,78
Kab. Karanganyar	3.970.278,92	4.188.330,50	4.401.301,74	4.654.054,50	4.921.454,71
Kab. Sragen	2.208.294,40	2.322.239,43	2.442.570,43	2.582.492,48	2.729.450,32
Kab. Grobogan	2.462.661,26	2.579.283,26	2.682.467,18	2.799.700,55	2.948.793,80
Kab. Blora	1.612.705,07	1.678.274,29	1.742.962,60	1.811.864,01	1.913.763,35
Kab. Rembang	1.762.799,91	1.825.560,59	1.926.563,25	1.999.951,16	2.093.412,59
Kab. Pati	3.473.080,90	3.609.798,36	3.770.330,52	3.966.062,17	4.162.082,37
Kab. Kudus	10.169.415,93	10.619.525,80	10.881.159,80	11.242.693,32	11.659.252,20
Kab. Jepara	3.272.708,72	3.411.159,47	3.554.051,11	3.722.677,82	3.889.988,85
Kab. Demak	2.379.485,66	2.471.258,72	2.570.573,50	2.677.366,77	2.787.524,02
Kab. Semarang	4.345.991,15	4.481.358,29	4.652.041,80	4.871.444,25	5.079.003,74
Kab. Temanggung	1.917.584,33	1.994.172,89	2.060.140,23	2.143.221,22	2.219.155,63
Kab. Kendal	4.167.626,21	4.277.354,27	4.434.408,16	4.625.437,33	4.806.891,86
Kab. Batang	1.918.980,13	1.972.776,85	2.022.301,42	2.092.973,93	2.169.854,55
Kab. Pekalongan	2.501.229,52	2.600.855,96	2.710.378,32	2.834.685,01	2.970.146,74
Kab. Pemalang	2.654.777,51	2.762.252,29	2.865.095,20	2.993.296,76	3.142.808,70
Kab. Tegal	2.682.689,71	2.809.340,21	2.955.259,71	3.120.395,64	3.286.263,44
Kab. Brebes	4.147.511,33	4.346.424,44	4.551.196,99	4.769.145,46	4.998.528,19
Kota Magelang	841.736,15	878.160,76	899.564,97	946.063,73	993.863,81
Kota Surakarta	3.669.373,45	3.858.169,67	4.067.529,94	4.304.287,37	4.549.342,95
Kota Salatiga	693.286,63	722.063,94	752.149,22	792.680,44	832.154,88
Kota Semarang	15.402.671,37	16.194.264,63	17.118.705,29	18.142.639,97	19.156.814,30
Kota Pekalongan	1.638.791,54	1.701.324,24	1.753.405,74	1.820.001,21	1.887.853,70
Kota Tegal	956.243,56	1.002.821,99	1.054.499,45	1.109.438,21	1.166.587,87

Sumber : Badan Pusat Statistik, Tinjauan PDRB Jawa Tengah, 2008

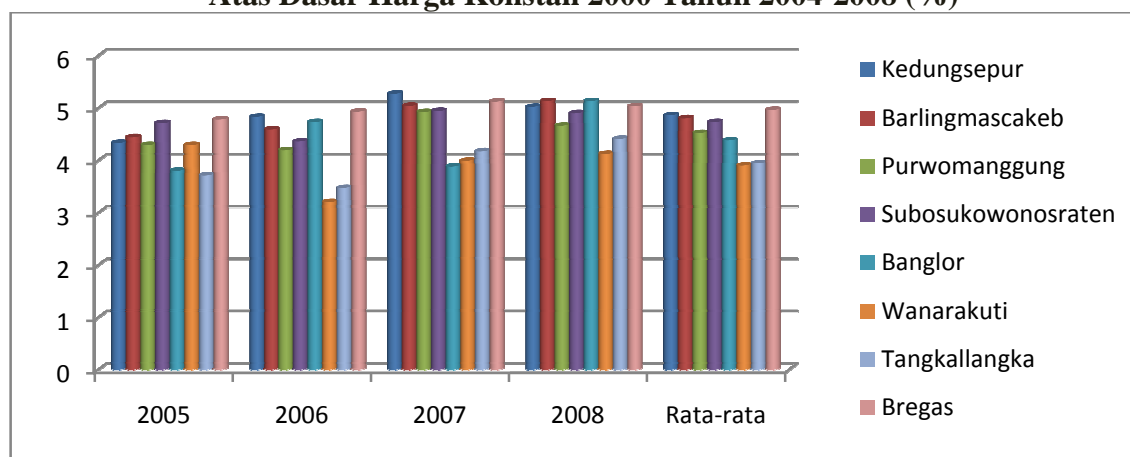
Perkembangan mengenai PDRB menurut harga konstan tahun 2000 yang dirinci menurut pembagian kerjasama antardaerah dijelaskan pada Tabel 1.2 dimana PDRB tertinggi adalah KEDUNGSEPUR.

Tabel 1.2
PDRB Kab/Kota Dirinci Menurut Pembagian Kawasan Strategis
Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2004-2008 (jutaan Rp)

Kawasan Strategis	2004	2005	2006	2007	2008
Kedungsepur	29,451,722.28	30,725,583.11	32,210,345.15	33,909,269.31	35,611,182.60
Barlingmascakep	19,444,809.54	20,307,201.28	21,239,796.52	22,311,087.23	23,455,494.01
Purwomanggung	9,597,992.45	10,010,203.19	10,429,134.06	10,942,617.63	11,452,643.47
Subosukowonosraten	23,260,477.77	24,354,991.65	25,415,704.44	26,671,686.27	27,978,009.11
Banglor	3,375,504.98	3,503,834.88	3,669,525.85	3,811,815.17	4,007,175.94
Wanarakuti	16,915,205.55	17,640,483.63	18,205,541.43	18,931,433.31	19,711,323.42
Tangkallangka	8,713,778.70	9,037,209.34	9,351,180.68	9,740,956.91	10,170,663.69
Bregas	7,786,444.60	8,158,586.64	8,560,956.15	8,998,979.31	9,451,379.50

Sumber : Badan Pusat Statistik, Tinjauan PDRB Jawa Tengah, 2008

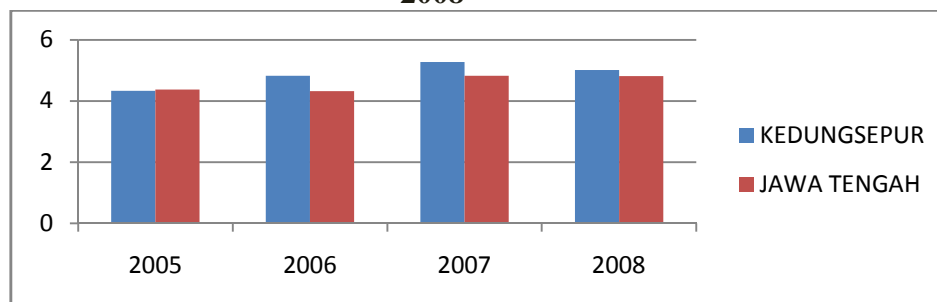
Gambar 1.1
Pertumbuhan PDRB Dirinci Menurut Pembagian Kawasan Strategis
Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2004-2008 (%)



Sumber : Badan Pusat Statistik, Tinjauan PDRB Jawa Tengah, 2008

Pada Gambar 1.1 dapat diketahui kawasan KEDUNGSEPUR merupakan salah satu kawasan yang rata-rata laju pertumbuhannya terbesar ke dua setelah kawasan BREGAS dari 8 (delapan) kawasan strategis di Jawa Tengah.

Gambar 1.2
Pertumbuhan PDRB KEDUNGSEPUR dengan Jawa Tengah, 2004-2008



Sumber : Badan Pusat Statistik, Tinjauan PDRB Jawa Tengah, 2008

Secara agregat perkembangan perekonomian di KEDUNGSEPUR pada tahun 2004-2008 lebih baik daripada perkembangan perekonomian di Propinsi Jawa Tengah. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 1.2 dimana pertumbuhan ekonomi di KEDUNGSEPUR selalu lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi Propinsi Jawa Tengah kecuali tahun 2005.

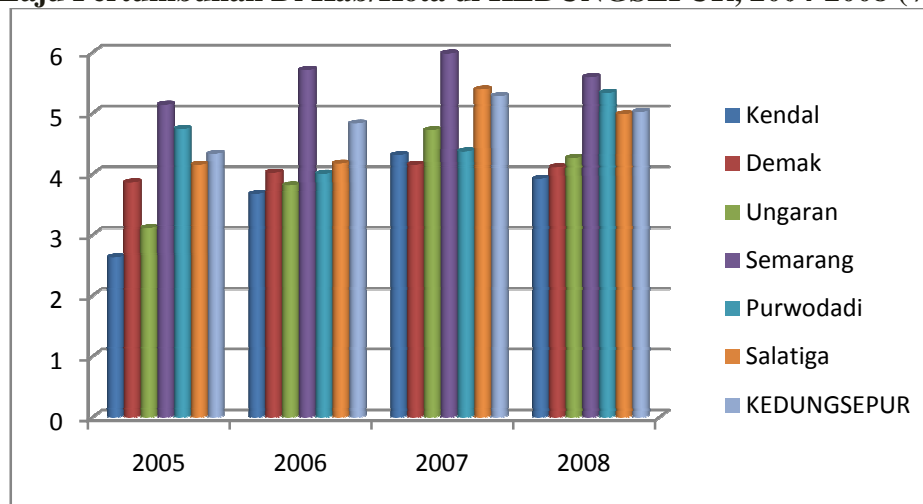
Tabel 1.3
PDRB Kabupaten/Kota di KEDUNGSEPUR, 2004-2008 (jutaan Rp)

KABUPATEN/KOTA	2004	2005	2006	2007	2008
Kab. Kendal	4.167.626,21	4.277.354,27	4.434.408,16	4.625.437,33	4.806.891,86
Kab. Demak	2.379.485,66	2.471.258,72	2.570.573,50	2.677.366,77	2.787.524,02
Kab. Semarang	4.345.991,15	4.481.358,29	4.652.041,80	4.871.444,25	5.079.003,74
Kota Semarang	15.402.671,37	16.194.264,63	17.118.705,29	18.142.639,97	19.156.814,30
Kab. Grobogan	2.462.661,26	2.579.283,26	2.682.467,18	2.799.700,55	2.948.793,80
Kota Salatiga	693.286,63	722.063,94	752.149,22	792.680,44	832.154,88

Sumber : Badan Pusat Statistik, Tinjauan PDRB Jawa Tengah, 2008

Pada Tabel 1.3 dapat diketahui bahwa Kota Semarang merupakan daerah yang termasuk penyumbang PDRB terbesar di kawasan KEDUNGSEPUR. Sedangkan daerah lainnya jauh lebih rendah daripada PDRB Kota Semarang.

Gambar 1.3
Laju Pertumbuhan Di Kab/Kota di KEDUNGSEPUR, 2004-2008 (%)



Sumber : Badan Pusat Statistik, Tinjauan PDRB Jawa Tengah, 2008

Pada tahun 2008 hanya Kabupaten Grobogan yang mengalami kenaikan pertumbuhan yaitu dari 4,37 persen di tahun 2007 menjadi 5,33 persen di tahun 2008. Pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di KEDUNGSEPUR tahun 2007 berkisar antara 4,15 persen sampai 5,98 persen, sedangkan pada tahun 2008 pertumbuhan ekonomi berkisar antara 3,92 persen sampai 5,59 persen. Pada tahun

2008, hanya ada dua daerah yang mengalami pertumbuhan ekonomi di atas pertumbuhan KEDUNGSEPUR (5,02 persen), yaitu Kota Semarang yang sebesar 5,59 persen dan Kab. Grobogan sebesar 5,33 persen, sedangkan empat daerah lainnya mengalami pertumbuhan ekonomi di bawah pertumbuhan KEDUNGSEPUR.

Salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk suatu daerah adalah dengan melihat PDRB perkapita. Semakin besar PDRB perkapita suatu daerah maka semakin baik tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Sebaliknya, semakin kecil PDRB perkapita suatu daerah maka semakin rendah tingkat kesejahteraan masyarakatnya. PDRB perkapita merupakan total PDRB masing-masing kabupaten/kota dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun di masing-masing kabupaten/kota dalam kawasan KEDUNGSEPUR.

Tabel 1.4
PDRB Per Kapita Di Kab / Kota Di Kawasan KEDUNGSEPUR
Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2004-2008 (jutaan Rp)

KAB/KOTA	TAHUN					RATA RATA
	2004	2005	2006	2007	2008	
Kab. Kendal	4.645.763,55	4.737.587,18	4.886.278,72	5.072.827,59	5.092.332,36	4.886.957,88
Kab. Demak	2.320.738,49	2.384.185,87	2.464.338,34	2.562.473,16	2.597.944,23	2.465.936,02
Kab. Semarang	4.891.765,42	5.013.978,15	5.182.888,83	5.410.191,08	5.573.831,80	5.214.531,06
Kota Semarang	11.085.412,96	11.503.021,77	12.053.338,15	12.651.241,91	12.990.524,22	12.056.707,80
Kab. Grobogan	1.815.148,71	1.891.154,53	1.951.803,63	2.024.502,39	2.119.980,91	1.960.518,03
Kota Salatiga	4.202.272,01	4.103.405,42	4.392.214,83	4.716.483,05	4.924.547,00	4.4467.784,46
KEDUNGSEPUR	4.826.850,19	4.938.888,82	5.155.143,75	5.406.286,53	5.549.860,09	5.175.405,88

Sumber : Badan Pusat Statistik, Tinjauan PDRB Jawa Tengah, 2008

Pada Tabel 1.4, hanya ada dua daerah yang PDRB per kapita nya di atas rata-rata PDRB per kapita KEDUNGSEPUR (Rp 5.175.405,88 juta) di tahun 2004 sampai dengan tahun 2008. Daerah tersebut adalah Kota Semarang sebesar Rp 12.056.707,80 juta dan Kabupaten Semarang sebesar Rp 5.214.531,06 juta, sedangkan empat daerah lainnya pertumbuhan PDRB per kapita nya di bawah rata-rata PDRB per kapita KEDUNGSEPUR.

1.2 Rumusan Masalah

Ketimpangan distribusi pendapatan dan pertumbuhan ekonomi merupakan masalah yang dihadapi dalam proses pembangunan. Menurut Emilia dan Imelia (2006), indikator yang digunakan untuk menganalisis ketimpangan antar wilayah, diantaranya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Konsumsi Rumah Tangga Perkapita, Kontribusi Sektoral terhadap PDRB, Tingkat Kemiskinan dan Struktur

Fiskal. Dilihat dari laju pertumbuhannya, laju pertumbuhan KEDUNGSEPUR lebih cepat dibandingkan dengan Jawa Tengah. Namun cepatnya laju pertumbuhan KEDUNGSEPUR, terdapat kesenjangan antara pertumbuhan ekonomi (PDRB) dan tingkat kesejahteraan (PDRB per kapita) di kabupaten/kota yang tergabung di kawasan ini. Artinya tingkat pertumbuhan ekonomi KEDUNGSEPUR yang tinggi belum tentu diikuti dengan keberhasilan dalam mendistribusikan pendapatan masyarakat di kabupaten/kota di KEDUNGSEPUR.

Tujuan pemerintah provinsi Jawa Tengah untuk pemerataan pendapatan dalam pembentukan kawasan ini masih belum berhasil karena pembangunan masih selalu terkonsentrasi pada daerah-daerah tertentu. Adanya perbedaan pertumbuhan inilah yang memicu adanya ketimpangan pendapatan antar masyarakat khususnya di KEDUNGSEPUR. Berdasar latar belakang di atas, maka penelitian ini mengambil judul **“ANALISIS PERTUMBUHAN EKONOMI DAN TINGKAT KETIMPANGAN DI KABUPATEN/KOTA YANG TERGABUNG DALAM KAWASAN KEDUNGSEPUR TAHUN 2004-2008”**

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan Penelitian :

1. Menganalisis besarnya tingkat ketimpangan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di kawasan KEDUNGSEPUR
2. Menganalisis sektor potensial Kabupaten/Kota di kawasan KEDUNGSEPUR

Kegunaan Penelitian :

1. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah atau pihak-pihak terkait untuk dipertimbangkan dalam pengambil keputusan dan perencanaan pembangunan daerah.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan khususnya bagi para pembaca yang tertarik untuk meneliti hal yang sama.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Merupakan pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang dari Kabupaten/Kota yang tergabung dalam kawasan KEDUNGSEPUR, rumusan masalah tentang disparitas yang terjadi di Kabupaten / Kota yang tergabung dalam kawasan KEDUNGSEPUR, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Menyajikan landasan teori yang menjadi dasar dan berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu tentang adanya disparitas di Kabupaten / Kota yang tergabung dalam kawasan KEDUNGSEPUR.

BAB III Metode Penelitian

Pada bab ini dipaparkan tentang definisi operasional, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis yang digunakan untuk mendukung dalam penelitian tentang disparitas di Kabupaten / Kota yang tergabung dalam kawasan KEDUNGSEPUR.

BAB IV Hasil dan Pembahasan

Pada bab ini dipaparkan tentang deskripsi obyek penelitian, analisis data dan pembahasan dari permasalahan yang ada di KEDUNGSEPUR.

BAB V Penutup

Pada bab ini memuat kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini serta beberapa saran yang membangun pihak-pihak terkait dalam masalah pertumbuhan ekonomi dan disparitas pendapatan di Kabupaten / Kota yang tergabung dalam kawasan KEDUNGSEPUR.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan perubahan tingkat kegiatan ekonomi yang berlangsung dari tahun ke tahun. Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi harus membandingkan pendapatan nasional yang dihitung berdasarkan nilai riil. Jadi perubahan pendapatan nasional hanya semata-mata disebabkan oleh perubahan dalam tingkat kegiatan ekonomi atau dengan kata lain pertumbuhan baru tercapai apabila jumlah barang dan jasa yang dihasilkan bertambah besar pada tahun berikutnya. Untuk mengetahui apakah perekonomian mengalami pertumbuhan, harus dibedakan PDRB riil suatu tahun dengan PDRB riil tahun sebelumnya (Sadono Sukirno, 2004).

Formula untuk menghitung pertumbuhan ekonomi dapat dituliskan sebagai berikut :

$$Y_t = \frac{\text{PDRB riil}_t - \text{PDRB riil}_{t-1}}{\text{PDRB riil}_{t-1}} \times 100 \dots\dots\dots (2-1)$$

Keterangan :

- | | | |
|----------------|---|-----------------------------------------|
| Y _t | = | Pertumbuhan ekonomi |
| PDRB riil | = | Pendapatan Domestik Regional Bruto riil |
| t | = | Periode tahun |

2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi Regional

Penekanan pertumbuhan ekonomi regional lebih dipusatkan pada pengaruh perbedaan karakteristik *space* terhadap pertumbuhan ekonomi. Faktor yang menjadi perhatian utama dalam teori pertumbuhan ekonomi regional (Robinson Tarigan, 2006):

1. Keuntungan Lokasi
2. Aglomerasi Migrasi
3. Arus lalu lintas modal antar wilayah.

Sedangkan faktor yang mempengaruhi teori pertumbuhan ekonomi nasional adalah :

1. Modal
2. Lapangan Kerja
3. Kemajuan Tehnologi

Teori Pertumbuhan Ekonomi Regional dibagi atas 4 kelompok (Emilia dan Imelia, 2006) yaitu :

1. *Export Base Models*

Dipelopori oleh Douglas C. North. Kelompok ini berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi suatu region akan lebih banyak ditentukan oleh jenis keuntungan lokasi (*comperative advantage*) dan dapat digunakan oleh daerah tersebut sebagai kekuatan ekspor. Keuntungan lokasi umumnya berbeda setiap region, hal ini tergantung pada keadaan geografi daerah setempat. Export Base Models berorientasi pada prinsip *comperative advantage* dan *comperative competitive*.

2. Model Neo Klasik

Penekanan analisisnya pada peralatan fungsi produksi. Unsur-unsur yang menentukan pertumbuhan ekonomi regional adalah modal, tenaga kerja dan teknologi. Selain itu dibahas secara mendalam perpindahan penduduk (migrasi) dan lalu lintas modal terhadap pertumbuhan ekonomi regional.

Model Neo Klassik dalam teori Simon Kuznet mengatakan bahwa terdapat hubungan antara tingkat pertumbuhan suatu negara dengan perbedaan kemakmuran daerah (*regional disparity*) pada negara yang bersangkutan. Pada saat proses pembangunan baru dimulai (negara sedang berkembang) tingkat perbedaan kemakmuran antar wilayah cenderung menjadi tinggi, sedangkan bila proses proses pembangunan telah berjalan dalam waktu lama (negara maju) maka perbedaan tingkat kemakmuran antar wilayah cenderung menurun. Hal tersebut dikarenakan :

1. Lalu lintas orang dan modal masih belum lancar
2. Belum lancarnya fasilitas perhubungan dan komunikasi

3. Masih kuatnya tradisi yang menghalangi mobilitas penduduk yang mengakibatkan belum lancarnya arus perpindahan orang dan modal antar wilayah.

3. Model *Cumulative Causation* (Keynes)

Menurut Dixon dan Thirwall (1974) setiap negara akan mengalami *Verdoorn Effect* yang artinya tidak terjadi penurunan dalam perbedaan tingkat kemakmuran antar wilayah walaupun negar tersebut tergolong maju. Daerah maju tetap berkembang secara pesat karena adanya hubungan positif antara kemajuan teknologi dengan tingkat keuntungan. Sedangkan daerah yang kurang berkembang akan tetap berkembang secara lambat karena tingkat keuntungan yang diperoleh pada daerah ini rendah. Peningkatan pemerataan pembangunan tidak dapat hanya diserahkan pada mekanisme pasar, tapi dapat dilakukan melalui campur tangan aktif dari pemerintah dalam bentuk program-program pembangunan wilayah.

4. Model *Core Periphery*

John Friedman menekankan analisisnya pada hubungan yang erat dan saling mempengaruhi antara pembangunan kota (*core*) dan desa (*periphery*). Menurut teori ini gerak langkah pembangunan daerah perkotaan akan lebih banyak ditentukan oleh keadaan desa–desa sekitarnya. Sebaliknya corak pembangunan daerah pedesaan sangat ditentukan oleh arah pembangunan daerah perkotaan yaitu aspek interaksi antar daerah (*spatial interaction*)

Menurut John Friedman hubungan *Core Periphery* dapat terjadi disebabkan karena :

1. Perluasan pasar
2. Penemuan sumber-sumber daya baru
3. Perbaikan prasarana perhubungan
4. Penyebaran teknologi antar daerah

2.1.3 Ketimpangan Pendapatan Regional

Menurut Emilia dan Imelia (2006), indikator yang digunakan untuk menganalisis ketimpangan antar wilayah, diantaranya Produk Domestik Regional

Bruto (PDRB), Konsumsi Rumah Tangga Perkapita, Kontribusi Sektoral terhadap PDRB, Tingkat Kemiskinan dan Struktur Fiskal.

Dalam perspektif antarwilayah, ketidakmerataan terjadi baik dalam hal tingkat pendapatan masyarakat antarwilayah yang satu dengan wilayah yang lain, maupun dalam hal distribusi pendapatan dikalangan penduduk masing-masing wilayah. Ketimpangan regional dalam pembangunan dapat ditengarai antara lain dengan menelaah perbedaan mencolok dalam aspek-aspek seperti penyerapan tenaga kerja, alokasi dana perbankan, investasi dan pertumbuhan (Dumairy, 1996).

Isu kesenjangan ekonomi antardaerah telah lama menjadi bahan kajian para pakar ekonomi regional. Hendra Esmara (1975) merupakan peneliti pertama yang mengukur kesenjangan ekonomi antardaerah. Berdasarkan data dari tahun 1950 hingga 1960, ia menyimpulkan Indonesia merupakan negara dengan kategori kesenjangan daerah yang rendah apabila sektor migas diabaikan. Begitu juga dengan Ardani pada tahun 1996 dan 1992 telah menganalisis kesenjangan pendapatan dan konsumsi antardaerah dengan menggunakan Indeks Williamson, bahwa pada tahap awal pembangunan ekonomi terdapat kesenjangan kemakmuran antardaerah, namun semakin maju pembangunan ekonomi kesenjangan tersebut semakin menyempit. Studi Ardani agaknya sejalan dengan hasil studi Akita dan Lukman pada tahun 1994, yang menemukan tidak terdapatnya perubahan kesenjangan ekonomi antardaerah selama 1983-1990 (Mudrajad Kuncoro, 2003).

Hirschman mengemukakan bahwa pembangunan ekonomi dipandang secara geografis keadaanya tidak seimbang yakni tidak merata ke semua daerah. Pada awalnya pertumbuhan ekonomi terpusat di beberapa daerah sedangkan pada daerah lainnya dalam keadaan terbelakang. Pada proses pertumbuhan selanjutnya perbedaan-perbedaan ini akan semakin lebar karena terdapat berbagai faktor yang mempersulit daerah miskin untuk berkembang, sehingga diperlukan campur tangan pemerintah untuk mengatasinya. Begitu juga jika suatu daerah mengalami perkembangan, maka perkembangan itu akan membawa pengaruh atau imbas ke daerah lain. Menurut Hirschman, daerah di suatu negara dapat dibedakan menjadi daerah kaya dan daerah miskin. Jika perbedaan antara kedua daerah tersebut

semakin menyempit berarti terjadi imbas balik (*trickling down effects*). Sedangkan jika perbedaan antara kedua daerah tersebut semakin jauh berarti terjadi pengkutuban (*polarization effects*) (Lincoln Arsyad, 1997). Pandangan Hirschman ini didukung oleh hipotesis Kuznets dan hasil penelitian Williamson dan El Shaks. Kuznets mengemukakan bahwa pada tahap-tahap permulaan pertumbuhan suatu daerah terdapat pembagian pendapatan yang cenderung semakin tidak merata, tetapi dengan semakin tumbuhnya daerah itu maka pembagian pendapatannya akan semakin merata.

2.1.4. Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan

Menurut Puslitbang Ekobank, LIPI, 1994 (dalam Lulus Prapti, 2006) teori pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Teori Karl Mark (1787) berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi pada tahap awal pembangunan akan meningkatkan permintaan tenaga kerja. Kenaikan tingkat upah dari tenaga kerja selanjutnya berpengaruh terhadap kenaikan resiko kapital terhadap tenaga kerja sehingga terjadi penurunan terhadap permintaan tenaga kerja. Akibatnya timbul masalah pengangguran dan ketimpangan pendapatan. Singkatnya, pertumbuhan ekonomi cenderung mengurangi masalah kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan hanya pada tahap awal pembangunan, kemudian pada tahap selanjutnya akan terjadi sebaliknya.
2. Menurut Kuznets seorang ekonom klasik menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi di negara miskin pada awalnya cenderung menyebabkan tingginya tingkat kemiskinan dan ketidak merataan distribusi pendapatan. Namun bila negara-negara miskin tersebut sudah semakin maju, maka persoalan kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan akan menurun (*an inverse U shaped patern*).
3. Para ekonom klasik (Roberti, 1974), Hayani dan Ruffan (1985), mengemukakan pertumbuhan ekonomi akan selalu cenderung mengurangi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan walaupun masih dalam tahap awal pertumbuhan. Bukti empiris dari pandangan ini berdasarkan pengamatan di beberapa negara seperti Taiwan, Hongkong, Singapura,

RRC. Kelompok Neo klasik sangat optimis bahwa pertumbuhan ekonomi pada prakteknya cenderung mengurangi ketimpangan pendapatan dan kemiskinan.

4. Neo Marxist menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi justru akan selalu menyebabkan melebarnya jurang ketimpangan antara si kaya dan si miskin. Hal ini terjadi karena adanya akumulasi modal dan kemajuan teknologi yang cenderung meningkatkan konsentrasi penguasaan sumberdaya dan kapital oleh para penguasa modal kelompok “elit” masyarakat. Sebaliknya nonpemilik modal akan tetap berada dalam keadaan kemiskinan.
5. Munculnya kontroversi mengenai ada atau tidaknya *trade off* antara ketidakmerataan dan pertumbuhan menurut Fields (1990) dalam Mudrajad Kuncoro (1997), tergantung dari jenis data yang digunakan, apakah cross section, time series atau menggunakan data mikro. Masing-masing akan menghasilkan perhitungan yang berbeda karena pendekatan yang dilakukan berbeda.

Penelitian yang dilakukan oleh Williamson (1966) menekankan pada kesenjangan antarwilayah di dalam negara. Williamson menghubungkan kesenjangan pendapatan rata-rata antarwilayah dengan berbagai faktor termasuk tingkat urbanisasi suatu wilayah. Dalam penelitian ini untuk menghitung ketimpangan pendapatan antar kabupaten/kota di KEDUNGSEPUR digunakan indeks ketimpangan Williamson.

2.1.5 Analisis Potensi Perekonomian Wilayah

Setelah otonomi daerah, masing-masing daerah sudah lebih bebas dalam menetapkan sektor atau komoditi yang diprioritaskan pengembangannya. Kemampuan pemerintah daerah untuk melihat sektor yang memiliki keunggulan atau kelemahan di wilayahnya menjadi semakin penting. Sektor yang memiliki keunggulan, memiliki prospek yang lebih baik untuk dikembangkan dan diharapkan dapat mendorong sektor-sektor lain untuk berkembang.

Ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk menentukan potensi perekonomian suatu wilayah. Pendekatan tersebut diantaranya adalah *Location Quotient* (LQ), analisis *Shift-Share*, dan analisis *Typologi Klassen*.

1. Analisis *Location Quotient* (LQ)

Dalam analisis *Location Quotient* (LQ), kegiatan ekonomi suatu daerah dibagi menjadi 2 golongan, yaitu :

a. Sektor Basis

Kegiatan sektor yang melayani pasar di daerah itu sendiri maupun di luar daerah yang bersangkutan.

b. Sektor non basis

Kegiatan sektor yang melayani pasar hanya di daerah tersebut.

Asumsi utama dalam analisis LQ adalah bahwa semua penduduk di setiap daerah mempunyai pola permintaan yang sama dengan pola permintaan pada tingkat daerah referensi, produktivitas tenaga kerja adalah sama dan setiap industri menghasilkan barang yang sama (homogeny) pada setiap sektor (Lincoln Arsyad, 1999).

2. Analisis *Shift Share*

Analisis *Shift Share* adalah salah satu teknik kuantitatif yang biasa digunakan untuk menganalisis perubahan struktur ekonomi daerah relatif terhadap struktur ekonomi wilayah yang lebih tinggi sebagai pembanding atau referensi. Analisis ini menggunakan 3 informasi dasar yang berhubungan satu sama lain yaitu :

- a. Pertumbuhan ekonomi referensi nasional yang menunjukkan bagaimana pengaruh pertumbuhan referensi terhadap perekonomian di kabupaten/kota.
- b. Pergeseran proporsional (*Proportional shift*), yang menunjukkan perubahan relatif kinerja suatu sektor di kabupaten/kota terhadap sektor yang sama di referensi.
- c. Pergeseran diferensial (*Differential Shift*), yang memberikan informasi dalam menentukan seberapa jauh daya saing industri kabupaten/kota dengan perekonomian yang dijadikan referensi.

3. Analisis *Typologi Klassen*

Teknik *Typologi Klassen* dapat digunakan melalui dua pendekatan yang pertama adalah dengan pendekatan sektoral yang mendasarkan pengelompokan suatu sektor dengan melihat pertumbuhan dan kontribusi sektor tertentu terhadap total PDRB kabupaten/kota dan yang kedua adalah dengan pendekatan wilayah/daerah seperti yang digunakan dalam penelitian Syafrizal untuk mengetahui klasifikasi daerah berdasarkan dua indikator utama, yaitu pertumbuhan ekonomi dan pendapatan atau produk domestik regional bruto (PDRB) per kapita daerah. Menurut *Typologi Klassen*, masing-masing sektor ekonomi/daerah tersebut dapat diklasifikasikan sebagai sektor/daerah prima, berkembang, potensial dan berkembang.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah suatu penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti-peneliti lain. Penelitian terdahulu berfungsi sebagai acuan penelitian ini karena untuk memudahkan bagi peneliti untuk mengaplikasikan penelitiannya. Penelitian ini modelnya sama seperti penelitian terdahulu, namun perbedaannya terletak pada obyek yang akan diteliti, tahun penelitian, dan permasalahan yang terjadi di wilayah yang akan diteliti, serta kebijakan yang sesuai untuk diterapkan di wilayah tersebut.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Judul dan Penulis	Variabel	Alat Analisis	Hasil
1	Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional Wilayah Indonesia Bagian Barat tahun 1997. (Syafrizal, 1997)	<ul style="list-style-type: none"> • PDRB • PDRB perkapita • Jumlah Penduduk • Laju pertumbuhan ekonomi 	<ul style="list-style-type: none"> • Tipologi Klassen • Indeks Williamson 	<p>Dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum angka ketimpangan regional untuk wilayah Indonesia bagian barat ternyata lebih rendah dibandingkan dengan angka ketimpangan untuk Indonesia secara keseluruhan.</p> <p>Hasil dari Tipologi Klassen yang termasuk daerah maju dan tumbuh cepat adalah Sumatra Utara, Riau dan Kalimantan Barat. Daerah berkembang cepat adalah Lampung. Daerah maju tapi tertekan adalah Aceh, Sumatra Barat dan Sumatra Selatan. Sedangkan daerah yang relative tertinggal adalah Jambi dan Bengkulu</p>

Tabel 2.2 (lanjutan)

2	Analisis Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan Antar Kecamatan di Kabupaten Kebumen Tahun 1996-2000. (Ahmad Salihabrur, 2002)	<ul style="list-style-type: none"> • PDRB • PDRB perkapita • Jumlah Penduduk • Laju pertumbuhan ekonomi 	<ul style="list-style-type: none"> • Indeks Williamson • Shift share 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berdasarkan indeks Williamson, kabupaten Kebumen dapat dikatakan mengalami pemerataan tingkat pendapatan dengan rata-rata 0,385 masih diambang kritis 0,5 2. Dari proporsional shift component (Pj) menunjukkan adanya enam sektor yang tumbuh relatif cepat pada tingkat kecamatan daripada di tingkat kabupaten. 3. Terdapat enam kecamatan (tipe IV)
3	Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Antar Kecamatan di Kabupaten Banyumas	<ul style="list-style-type: none"> • PDRB • PDRB perkapita • Jumlah Penduduk 	<ul style="list-style-type: none"> • Indeks Williamson • Indeks Entropy Theil 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berdasarkan tipologi Klassen, daerah/kecamatan di Kabupaten Banyumas dapat diklasifikasikan berdasarkan pertumbuhan dan pendapatan per kapita menjadi empat kelompok yaitu kecamatan cepat maju dan cepat tumbuh, kecamatan yang maju tapi tertekan, kecamatan yang berkembang cepat dan kecamatan tertinggal. 2. Pada periode pengamatan 1993–2000 terjadi kecenderungan peningkatan ketimpangan,
4	Analisis Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Ketimpangan Antar Wilayah Kecamatan di Kabupaten Semarang Periode 2000-2004. (Widya Puspita Ayu, 2008) Periode Tahun 1993-2003. (Sutarno dan Mudrajad Kuncoro, 2004)	<ul style="list-style-type: none"> • PDRB • PDRB perkapita • Jumlah Penduduk • Laju pertumbuhan ekonomi 	<ul style="list-style-type: none"> • Tipologi Klassen • LQ • Shift share • Indeks Williamson • Indeks Theil 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil dari Tipologi Klassen adalah kecamatan yang termasuk pada kuadran I yaitu Kec. Pringapus dan Kec. Bergas. Pada kuadran II yaitu Kec. Ungaran dan Kec. Pabelan. Kuadran III terdapat Kec. Tuntang, Kec. Jambu dan Kec. Ungaran. Sedangkankuadran IV yaitu Kec. Suruh, Kec. Banyubiru, Kec. Ambarawa, Kec. Bawen, Kec. Sumowono, Kec. Getasan, Kec. Bringin, Kec. Bancak, Kec. Kaliwungu, dan Kec. Susukan 2. Nilai rata-rata indeks Williamson kabupaten Semarang adalah 0,533, sedangkan nilai rata-rata indeks entropy Theil sebesar 18,344. 3. LQ tiap kecamatan di Kabupaten Semarang kebanyakan bersektor basis pada pertanian, sedangkan sektor industri merupakan sektor basis di empat kecamatan saja, dari 17

Tabel 2.2 (lanjutan)

	Periode Tahun 1993-2003. (Sutarno dan Mudrajad Kuncoro, 2004)	<ul style="list-style-type: none"> • Laju pertumbuhan ekonomi 	Tipologi Klassen	kecamatan di Kabupaten Semarang 4. Hasil Analisis Shift Share diketahui terdapat 6 sektor yang mempunyai nilai $P_j > 0$ merata di kecamatan Kabupaten Semarang, sektor tersebut adalah sektor industri, sektor, listrik, gas dan air, sektor bangunan, sektor angkutan, dan sektor jasa
5	Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Ketimpangan Antar Wilayah Kecamatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2000-2006. (Teguh Prayitno, 2009)	<ul style="list-style-type: none"> • PDRB • PDRB perkapita • Jumlah Penduduk • Laju pertumbuhan ekonomi 	<ul style="list-style-type: none"> • Tipologi Klasse n • Indeks Williamson 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berdasarkan indeks Williamson menunjukkan bahwa sebelum dan sesudah pemekaran, tingkat ketimpangan di kabupaten Kebumen adalah rendah. 2. Kebanyakan kecamatan di kabupaten Kebumen berada pada daerah relatif tertinggal (tipologi IV).

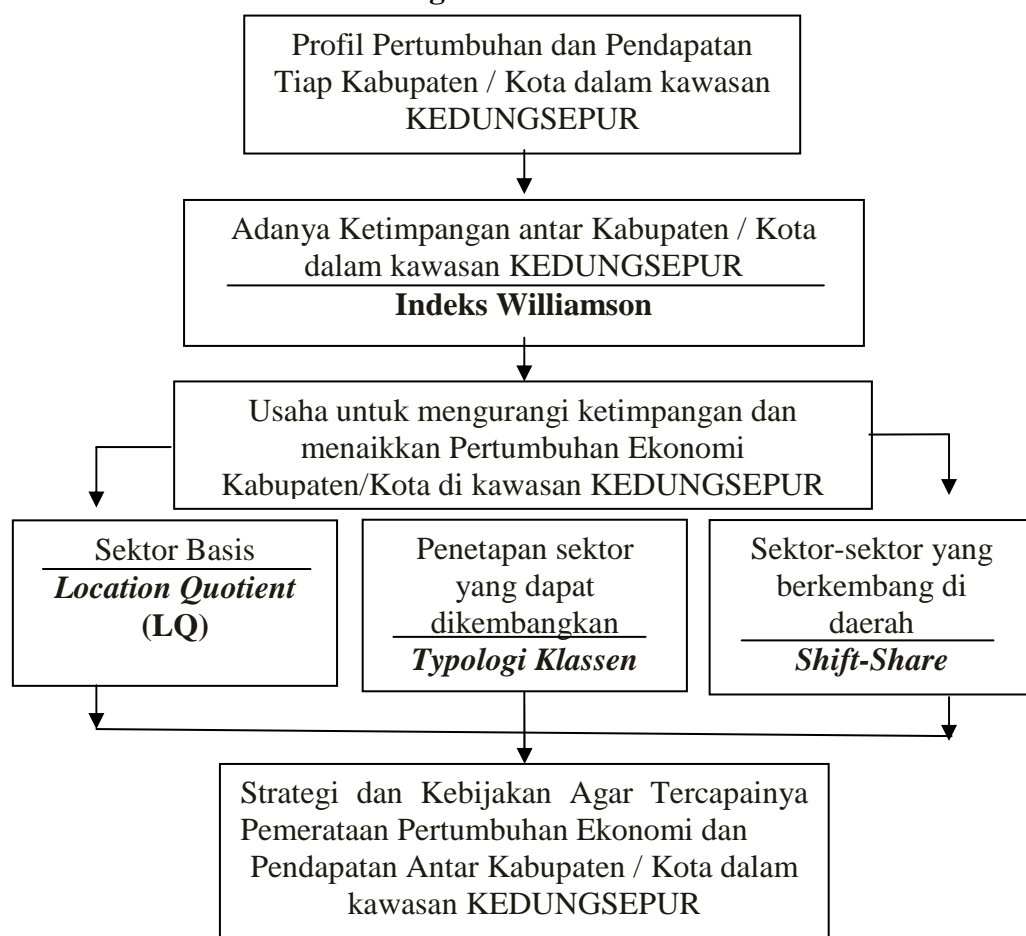
2.3 Kerangka Pemikiran

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan indikator keberhasilan pembangunan suatu daerah yang dapat dilihat melalui PDRB serta pendapatan perkapita. PDRB menggambarkan fluktuasi produk yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi suatu daerah. Sedangkan pendapatan perkapita adalah hasil bagi PDRB dengan jumlah penduduk yang seringkali dijadikan ukuran tingkat kesejahteraan masyarakat.

Dalam penelitian ini untuk mengukur ketimpangan pendapatan antar kabupaten/kota di KEDUNGSEPUR selama tahun 2004-2008 menggunakan Indeks Williamson (IW), dengan besaran nilai antara 0-1. Semakin besar IW maka semakin besar kesenjangan, sebaliknya jika IW semakin kecil (mendekati 0) maka semakin merata. Nilai $IW < 0,3$ berarti disparitas pendapatan yang terjadi tergolong rendah, IW antara 0,3 – 0,5 termasuk kategori sedang, kemudian dikatakan tinggi jika $IW > 0,5$.

Untuk mengurangi tingkat ketimpangan kabupaten/kota di KEDUNGSEPUR maka perlu diketahui sektor-sektor yang berpotensi di tiap kabupaten/kota di KEDUNGSEPUR yaitu dengan menggunakan alat analisis *Location Quotient* (LQ), *Shift-share* dan *Tipologi Klassen*. Analisis LQ menyajikan perbandingan relatif antara kemampuan suatu sektor di daerah yang diselidiki dengan kemampuan yang sama pada daerah yang lebih luas. Analisis *Shift-Share* digunakan untuk mengetahui perubahan struktur / kinerja ekonomi daerah terhadap struktur ekonomi yg lebih tinggi sebagai referensi. Analisis *Tipologi Klassen* digunakan untuk mengklasifikasikan daerah berdasarkan tingkat pertumbuhan PDRB dan pendapatan perkapitanya, serta mengklasifikasikan sektor-sektor berdasarkan percepatan pertumbuhan dan pangsaanya.

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



Sumber : Syafrizal (1997) dengan modifikasi sesuai dengan objek penelitian.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Untuk menghindari salah persepsi dan pemahaman terhadap variabel-variabel yang akan dianalisis, maka akan diberikan batasan terhadap variabel-variabel berikut ini :

1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah laju kenaikan nilai PDRB riil pada tiap tahun yang terjadi di 6 Kabupaten/Kota di KEDUNGSEPUR. Satuan yang digunakan untuk mengukur laju pertumbuhan ekonomi adalah persentase.

2. PDRB

PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit-unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi disuatu wilayah. Unit-unit tersebut dikelompokkan menjadi 9 sektor lapangan usaha. PDRB yang digunakan dalam penelitian ini adalah PDRB Kabupaten/kota yang termasuk dalam kawasan KEDUNGSEPUR atas dasar harga konstan 2000 periode 2004-2008.

3. Disparitas Pendapatan

Disparitas pendapatan adalah perbedaan pendapatan pada suatu daerah dengan daerah lain yang berada dalam kawasan tertentu. Satuan yang digunakan untuk mengukur tingkat disparitas pendapatan adalah angka Indeks Williamson.

4. Daerah/Wilayah

Daerah/wilayah dalam penelitian ini mengacu pada pendekatan wilayah perencanaan. Menurut Glasson (dalam Emilia dan Imelia, 2006) menyebutkan bahwa wilayah perencanaan (*planning region* atau *programming region*) merupakan wilayah yang memperlihatkan koherensi atau kesatuan keputusan-keputusan ekonomi. Daerah yang digunakan dalam penelitian ini adalah kabupaten/kota yang termasuk dalam kawasan KEDUNGSEPUR.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini seluruhnya adalah data sekunder untuk periode tahun 2004-2008. Adapun data yang diperoleh dalam penelitian ini bersumber dari BPS Propinsi Jawa Tengah. Data yang digunakan adalah :

1. PDRB atas dasar harga konstan 2000 Provinsi Jawa Tengah tahun 2004-2008
2. PDRB atas dasar harga konstan 2000 kabupaten / kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2004-2008
3. PDRB perkapita atas dasar harga konstan 2000 Provinsi Jawa Tengah tahun 2004-2008
4. PDRB perkapita atas dasar harga konstan 2000 kabupaten / kota di Kawasan KEDUNGSEPUR tahun 2004-2008
5. Jumlah penduduk masing-masing Kabupaten / Kota yang tergabung dalam kawasan KEDUNGSEPUR tahun 2004-2008
6. Jumlah Penduduk Propinsi Jawa Tengah Tahun 2004-2008
7. Data Geografis dan data-data yang mendukung dalam penelitian ini.

Alasan pemilihan periode 2004-2008 karena dalam kurun waktu 2004-2008 perkembangan perekonomian di KEDUNGSEPUR cenderung ke arah yang lebih baik, hal ini ditunjukkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi KEDUNGSEPUR pada tahun 2004-2008 lebih tinggi daripada rata-rata laju pertumbuhan Provinsi Jawa Tengah (Tabel 1.4).

3.3 Metode Analisis Data

3.3.1 Indeks Williamson

Williamson (dalam Sutarno, 2003) meneliti hubungan antara disparitas regional dengan tingkat pembangunan ekonomi dengan menggunakan data ekonomi yang sudah maju dan berkembang. Dalam penelitian tersebut ditemukan bahwa selama tahap awal pembangunan, disparitas regional menjadi lebih besar dan pembangunan terkonsentrasi pada daerah-daerah tertentu. Pada tahap yang lebih matang dari pertumbuhan ekonomi tampak adanya keseimbangan antar daerah dan disparitas berkurang dengan signifikan. Metode ini diperoleh dari

perhitungan pendapatan regional perkapita dan jumlah penduduk masing-masing daerah. Rumus Indeks Williamson (Mudrajad Kuncoro, 2004) :

$$VW = \frac{\sqrt{\sum(Y_i - Y)^2 f_i / n}}{Y} \dots\dots\dots (3-1)$$

Keterangan :

- VW = Indeks Williamson
- Y_i = PDRB perkapita di Kabupaten i
- Y = PDRB perkapita rata-rata KEDUNGSEPUR
- f_i = Jumlah penduduk di kabupaten i
- n = jumlah penduduk KEDUNGSEPUR

Dengan menggunakan Indeks Williamson, maka kita dapat melihat seberapa besar ketimpangan yang terjadi antar wilayah. Besarnya nilai ini bernilai positif dan berkisar antara angka 0-1. Semakin besar nilai indeks ini (mendekati angka 1), berarti semakin besar tingkat ketimpangan pendapatan antar daerah dalam wilayah tersebut, begitu juga sebaliknya. Apabila nilai indeks Williamson antara diatas 0,5 maka dapat dikatakan terjadi ketidakmerataan tinggi. Namun apabila nilai indeks Williamson dibawah 0,5 maka dapat dikatakan terjadi ketidakmerataan rendah.

3.3.2 Analisis *Location Quotient* (LQ)

Metode *Location Quotient* (Robinson Tarigan, 2005) digunakan untuk mengetahui sektor basis atau potensial suatu daerah tertentu. Metode ini menyajikan perbandingan relatif antara kemampuan sektor di daerah (kabupaten/kota) dengan kemampuan sektor yang sama pada daerah yang lebih luas (KEDUNGSEPUR).

Rumus *Location Quotient* (LQ) adalah (Robinson Tarigan, 2005). :

$$LQ = \frac{S_i / S}{N_i / N} \dots\dots\dots (3-2)$$

Keterangan :

- S_i = Nilai tambah sektor i di Kabupaten/kota
- S = PDRB di Kabupaten/kota
- N_i = Nilai tambah sektor i di KEDUNGSEPUR

$N = \text{PDRB di KEDUNGSEPUR}$

Dari perhitungan LQ, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Jika nilai $LQ > 1$, maka sektor tersebut merupakan sektor basis. Sektor tersebut tidak hanya memenuhi kebutuhan di dalam daerah saja namun juga kebutuhan di luar daerah karena sektor ini sangat potensial untuk dikembangkan.
2. Jika nilai $LQ = 1$, maka sektor tersebut hanya cukup memenuhi kebutuhan di daerahnya saja.
3. Jika nilai $LQ < 1$, maka sektor tersebut merupakan sektor non basis dan perlu impor produk dari luar daerah karena sektor ini kurang prospektif untuk dikembangkan.

3.3.3 Analisis *Shift Share*

Analisis *Shift Share* adalah analisis yang bertujuan untuk menentukan kinerja atau produktivitas kerja perekonomian daerah dengan membandingkannya dengan daerah yang lebih besar (regional atau nasional). Analisis *shift-share* digunakan untuk melihat output total dari sektor-sektor negara baik dari faktor lokasi maupun pengaruh dari struktur industri. Analisis ini digunakan untuk melengkapi analisis LQ yang telah dilakukan sebelumnya.

Analisis *Shift Share* menggunakan tiga informasi dasar yang berhubungan satu sama lain, yaitu :

1. Pertumbuhan ekonomi nasional (*national share*)

Menunjukkan bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi nasional terhadap perekonomian daerah. Nilai *national share* positif di daerah-daerah (kabupaten/kota) yang tumbuh lebih cepat dan negatif di daerah-daerah (kabupaten/kota) yang tumbuh lebih lambat atau merosot dibandingkan dengan pertumbuhan secara nasional (KEDUNGSEPUR)

2. Pergeseran Proporsional (*proportional shift*)

Menunjukkan perubahan relatif kinerja suatu sektor di daerah tertentu terhadap sektor yang sama di referensi propinsi atau nasional. Pergeseran proporsional (*proportional shift*) disebut juga pengaruh bauran industri

(*industry mix*). Pengukuran ini memungkinkan untuk mengetahui apakah perekonomian daerah terkonsentrasi pada industri-industri yang tumbuh lebih cepat ketimbang perekonomian yang dijadikan referensi. Komponen ini positif di daerah-daerah (kabupaten/kota) yang berspesialisasi dalam sektor-sektor yang secara nasional (KEDUNGSEPUR) tumbuh lebih cepat dan negatif di daerah-daerah (kabupaten/kota) yang berspesialisasi dalam sektor-sektor yang secara nasional (KEDUNGSEPUR) tumbuh dengan lambat atau merosot.

3. Pergeseran differensial (*differential shift*)

Menunjukkan informasi dalam menentukan seberapa jauh daya saing industri daerah dengan perekonomian yang dijadikan referensi. Jika dari suatu industri adalah positif, maka industri tersebut relatif lebih tinggi daya saingnya dibandingkan industri yang sama pada perekonomian yang dijadikan referensi. Pergeseran differensial ini disebut juga pengaruh keunggulan kompetitif. Jika nilai komponen ini positif, maka sektor tersebut sektor yang kompetitif karena mempunyai keuntungan lokasional seperti sumber daya yang melimpah, sedangkan daerah yang secara lokasional tidak menguntungkan akan mempunyai nilai negatif dan mengalami penurunan *competitiveness*.

Menurut Tri Widodo (2006) bentuk umum persamaan dari analisis *shift share* dan komponen-komponennya adalah :

$$\text{➤ } D_{ij} = N_{ij} + M_{ij} + C_{ij} \quad \dots\dots\dots(3-3)$$

$$\text{➤ } N_{ij} = E_{ij} \times R_n \quad \dots\dots\dots(3-4)$$

$$\text{➤ } M_{ij} = E_{ij} (R_{in} - R_n) \quad \dots\dots\dots(3-5)$$

$$\text{➤ } C_{ij} = E_{ij} (R_{ij} - R_{in}) \quad \dots\dots\dots(3-6)$$

Keterangan :

D_{ij} = Dampak nyata pertumbuhan ekonomi daerah (kab/kota) dari pengaruh pertumbuhan nasional (KEDUNGSEPUR)

N_{ij} (*National share*) = Pengaruh pertumbuhan ekonomi nasional (KEDUNGSEPUR) terhadap perekonomian di suatu daerah (kab/kota).

M_{ij} = Pergeseran proporsional (*proportional shift*) atau pengaruh bauran industri

C_{ij} (*Differential Shift*) = pengaruh keunggulan kompetitif suatu sektor tertentu (kab/kota) dibanding tingkat nasional (KEDUNGSEPUR)

E_{ij} = PDRB (*output*) sektor i (kab/kota)

R_{ij} = Tingkat pertumbuhan sektor I (kab/kota)

R_{in} = Tingkat pertumbuhan sektor I (KEDUNGSEPUR)

R_n = Tingkat pertumbuhan PDRB (KEDUNGSEPUR)

3.3.4 Analisis *Typologi Klassen*

Melalui analisis ini diperoleh empat klasifikasi melalui pendekatan wilayah dan pendekatan sektor. Kabupaten/kota yang masing-masing mempunyai karakteristik pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita yang berbeda-beda diklasifikasikan dengan tipologi Klassen pendekatan wilayah (Syafrizal, 1997).

Tabel 3.1
Pengelompokan Pembangunan Klasifikasi Klassen

<p>Kuadran I Maju dan Tumbuh Pesat <i>(Developed Sector)</i></p> <p>$y_1 > y ; r_1 > r$ $S_i > S$ dan $SK_i > SK$</p>	<p>Kuadran II Maju tapi Tertekan <i>(Stagnant Sector)</i></p> <p>$y_1 < y ; r_1 > r$ $S_i < S$ dan $SK_i > SK$</p>
<p>Kuadran III Berkembang <i>(Developing Sector)</i></p> <p>$y_1 > y ; r_1 < r$ $S_i > S$ dan $SK_i < SK$</p>	<p>Kuadran IV Terbelakang <i>(Underdeveloped Sector)</i></p> <p>$y_1 < y ; r_1 < r$ $S_i < S$ dan $SK_i < SK$</p>

Sumber : Syafrizal, 1997

Keterangan :

y_1 = pendapatan perkapita kabupaten/kota

y = pendapatan total perkapita KEDUNGSEPUR

r_1 = laju pertumbuhan PDRB kabupaten/kota

r = laju pertumbuhan total PDRB KEDUNGSEPUR

S_i = Nilai sektor i kabupaten/kota

S = Rata-rata PDRB KEDUNGSEPUR

SK_i = Kontribusi nilai sektor terhadap PDRB kabupaten/kota

SK = Kontribusi nilai sektor terhadap PDRB KEDUNGSEPUR

1. Daerah/sektor tumbuh maju dan cepat (*Rapid Growth region* / Kuadran I)

Daerah/sektor maju dan cepat tumbuh (*Rapid Growth Region*) adalah daerah yang mengalami laju pertumbuhan PDRB dan tingkat pendapatan per kapita yang lebih tinggi dari rata-rata seluruh daerah. Pada dasarnya daerah-daerah tersebut merupakan daerah yang paling maju, baik dari segi tingkat pembangunan maupun kecepatan pertumbuhan. Biasanya daerah-daerah ini merupakan daerah yang mempunyai potensi pembangunan yang sangat besar dan telah dimanfaatkan secara baik untuk kemakmuran masyarakat setempat. Karena diperkirakan daerah ini akan terus berkembang dimasa mendatang.

2. Daerah/sektor maju tapi tertekan (*Retarded Region* / Kuadran II).

Daerah/sektor maju tapi tertekan (*Retarded Region*) adalah daerah-daerah yang relatif maju tetapi dalam beberapa tahun terakhir laju pertumbuhannya menurun akibat tertekannya kegiatan utama daerah yang bersangkutan. Karena itu, walaupun daerah ini merupakan daerah telah maju tetapi dimasa mendatang diperkirakan pertumbuhannya tidak akan begitu cepat, walaupun potensi pembangunan yang dimiliki pada dasarnya sangat besar.

3. Daerah/sektor berkembang cepat (*Growing Region* / Kuadran III).

Daerah/sektor berkembang cepat (*Growing Region*) pada dasarnya adalah daerah yang memiliki potensi pengembangan sangat besar, tetapi masih belum diolah secara baik. Oleh karena itu, walaupun tingkat pertumbuhan ekonominya tinggi namun tingkat pendapatan per kapitanya, yang mencerminkan tahap pembangunan yang telah dicapai sebenarnya masih relatif rendah dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Karena itu dimasa mendatang daerah ini diperkirakan akan mampu berkembang dengan pesat untuk mengejar ketertinggalannya dengan daerah maju.

4. Daerah/sektor relatif tertinggal (*Relatively Backward Region* / Kuadran IV).
Kemudian daerah/sektor relatif tertinggal (*Relatively Backward Region*) adalah daerah yang mempunyai tingkat pertumbuhan dan pendapatan per kapita yang berada dibawah rata-rata dari seluruh daerah. Ini berarti bahwa baik tingkat kemakmuran masyarakat maupun tingkat pertumbuhan ekonomi di daerah ini masih relatif rendah. Tetapi hal ini tidak berarti bahwa didaerah ini tidak akan berkembang di masa mendatang. Melalui pengembangan sarana dan prasarana perekonomian daerah berikut tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat setempat diperkirakan daerah ini secara bertahap akan dapat pula mengejar ketertinggalannya.